

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA
MODAL, DAN PENGANGGURAN TERHADAP
KEMISKINAN: KOMPARASI PROVINSI SUMATERA
SELATAN DAN PROVINSI LAMPUNG**



Skripsi Oleh :

REZA PANCA MAHARANI

01021181823029

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN
PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN : KOMPARASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI LAMPUNG**

Disusun Oleh:

Nama : Reza Panca Maharani
NIM : 01021181823029
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING



Tanggal 14 Juni 2023

**Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN : KOMPARASI PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI LAMPUNG

Disusun Oleh:

Nama : Reza Panca Maharani
NIM : 01021181823029
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 27 Juni 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 27 Juni 2023

Ketua

Anggota



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP.196903142014092001



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP.199004072018032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001



SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Panca Maharani
NIM : 01021181823029
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan : Komparasi Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.

Pembimbing : Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 27 Juni 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 3 Juli 2023
Pembuat Pernyataan,



Reza Panca Maharani
NIM. 01021181823029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang *berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan : Komparasi Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung”* untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan pengangguran terhadap kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kepentingan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi akademisi, pemerintah, mahasiswa/mahasiswi serta para pembaca.

Indralaya, 5 Juni 2023



Reza Panca Maharani
NIM.01021181823029

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dengan hormat kepada :

1. Allah SWT dengan segala Rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Kedua orangtua penulis tercinta, Ayahanda Rota S.Ag., M.Si dan Ibunda Rosmedianty S.Pd.,M.Si yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan yang penuh dalam bentuk apapun demi kelancaran pendidikan penulis.
3. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta saran dalam pembuatan skripsi ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji saya yang telah membantu memberikan kritik, saran serta masukan dalam skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Azwardi, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu dan memberikan semangat kepada saya ketika membutuhkan bimbingan akademik selama menjalani proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

7. Dosen-Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan dan dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang nantinya menjadi bekal ilmu di masa yang akan datang.
8. Saudara Kandungku tercinta, ayuk Richa, ayuk Rizky, ayuk Rosa dan ayuk Rosi serta kakak iparku kak Ricki, kak Arya dan kak David yang telah memberikan doa motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Para sahabat terdekat yang tersayang Dimas Imam Mursaha, Putri Alisia, Siti, Madarina, Nur Anisa, Febtin, Lita dan lainnya yang telah memberi semangat, tenaga dan waktunya kepada penulis yang mana penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang turut mendoakan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka penulis penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk penulisan skripsi ini menjadi lebih baik di kemudian hari.

Indralaya, 17 Juli 2023



Reza Panca Maharani
NIM. 01021181823029

ABSTRAK

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN : KOMPARASI PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

Reza Panca Maharani; Siti Rohima

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan pengangguran terhadap kemiskinan dengan komparasi provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dari tahun 2009-2021 dengan metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah tingkat kemiskinan, pendapatan asli daerah, belanja modal dan pengangguran. Hasil menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung, pada belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung, pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan serta pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Lampung.

Kata kunci: Tingkat Kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pengangguran.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Pembimbing



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

NIP.196903142014092001

ABSTRACT

ANALYSIS OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE, CAPITAL EXPENDITURE AND UNEMPLOYMENT ON POVERTY : COMPARISON IN THE PROVINCES OF SOUTH SUMATRA AND LAMPUNG

by:

Reza Panca Maharani; Siti Rohima

This study aims to determine the effect of local own revenue, capital expenditure, and unemployment on poverty in the provinces of South Sumatra and Lampung. The data used in this research is secondary data from 2009-2021 with the analytical method using multiple linear regression. The variables used in this research are the poverty rate, local own-source revenue, capital expenditure and unemployment. The results show that local revenue has a negative and significant effect on poverty in South Sumatra Province and Lampung Province, capital expenditure has a negative and insignificant effect on poverty in South Sumatra Province and Lampung Province, Unemployment has a positive and insignificant effect on poverty in South Sumatra Province and unemployment has a negative and insignificant effect on poverty in Lampung Province.

Keywords: Poverty Rate, Local Own Revenue, Capital Expenditures, Unemployment

Acknowledge by,

Head of Development Economics Department

Advisor



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

NIP.196903142014092001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Reza Panca Maharani
NIM : 01021181823029
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 Maret 2000
Alamat : Jl. Brigjen Hasan Kasim Irg. Kenanga
RT. 046 RW.010 No.20B Kel.
Bukitsangkal, Kec. Kalidoni, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

No. Handphone : 081273472725
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Email : rezapanca2403@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 2006 – 2007 : SD Negeri 193 Palembang
- 2007 – 2012 : SD Negeri 194 Palembang
- 2012 – 2015 : SMP Negeri 4 Palembang
- 2015 – 2018 : SMA Negeri 5 Palembang
- 2018 – 2023 : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas
Ekonomi, Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori & Konseptual.....	13
2.1.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan	13
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	14
2.1.3 Kemiskinan	15
2.1.4 Otonomi Daerah.....	16
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah	17
2.1.6 Belanja Modal	18
2.1.7 Pengangguran.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Pikir.....	22
2.4 Hipotesis Penelitian	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	25
3.2 Jenis dan Sumber Data	25
3.3 Metode Pengumpulan Data	25
3.4 Teknik Analisis.....	26
3.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda	26
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	28
3.4.3 Pengujian Hipotesis.....	29
3.4.4 Definisi Operasional Variabel.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung	33
4.1.2 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung	35
4.1.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung	36
4.1.4 Perkembangan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung	38
4.1.5 Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung	39
4.2 Hasil Penelitian.....	41
4.2.1 Provinsi Sumatera Selatan.....	41
4.2.2 Provinsi Lampung	48
4.2.3 Uji Hipotesis	51
4.3 Komparasi Variabel Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung	53
4.4 Pembahasan	54
4.4.1 Provinsi Sumatera Selatan.....	54
4.4.2 Provinsi Lampung	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

LAMPIRAN.....	70
---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Regresi Linier Berganda Sumatera Selatan	41
Tabel 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas Provinsi Sumatera Selatan	43
Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi Provinsi Sumatera Selatan	44
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Selatan	45
Tabel 4. 5 Hasil Uji F Provinsi Sumatera Selatan	45
Tabel 4. 6 Hasil Uji t di Provinsi Sumatera Selatan	46
Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²) Provinsi Sumatera Selatan	47
Tabel 4. 8 Hasil Regresi Linier Berganda Provinsi Lampung	48
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas Provinsi Lampung	49
Tabel 4. 10 Hasil Uji Autokorelasi Provinsi Lampung	50
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Lampung	50
Tabel 4. 12 Hasil Uji F Provinsi Lampung	51
Tabel 4. 13 Hasil Uji t Provinsi Lampung	51
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²) Provinsi Lampung	52
Tabel 4. 15 komparasi variabel Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2021	5
Gambar 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2021	6
Gambar 1. 3 Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2021	8
Gambar 1. 4 Persentase Pengangguran Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2021	9
Gambar 2. 1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan.....	13
Gambar 2. 2 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung	34
Gambar 4. 2 Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung Tahun 2009-2021	35
Gambar 4. 3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung Tahun 2009-2021	37
Gambar 4. 4 Perkembangan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung Tahun 2009-2021	38
Gambar 4. 5 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2021	40
Gambar 4. 6 Uji Normalitas Provinsi Sumatera Selatan	43
Gambar 4. 7 Hasil Uji Normalitas Provinsi Lampung	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Variabel Provinsi Sumatera Selatan	70
Lampiran 2 Hasil Regresi Linier Berganda Provinsi Sumatera Selatan	70
Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas Provinsi Sumatera Selatan	71
Lampiran 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Provinsi Sumatera Selatan	71
Lampiran 5 Hasil Uji Autokorelasi Provinsi Sumatera Selatan	72
Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Selatan.....	72
Lampiran 7 Data Variabel Provinsi Lampung	73
Lampiran 8 Hasil Regresi Linier Berganda Provinsi Lampung	73
Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas Provinsi Lampung	74
Lampiran 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Provinsi Lampung	74
Lampiran 11 Hasil Uji Autokorelasi Provinsi Lampung	75
Lampiran 12 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Lampung	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara didirikan dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Tetapi dalam membangun kesejahteraan masyarakat ini, salah satu rintangan yang dihadapi pemerintah yaitu kemiskinan. Permasalahan kemiskinan ini dilanda oleh seluruh negara termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang tidak lepas dari besarnya angka kemiskinan.

Indonesia ialah negara besar yang memiliki banyak pulau disertai dengan beragam suku dan agama masyarakatnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam kondisi politik, sosial budaya serta ekonomi, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan, akses modal serta perbedaan kualitas sumber daya manusia. Maka diperlukan rencana dalam pengentasan kemiskinan yang menjadi beban pembangunan sesuai kondisi daerah tersebut.

Desentralisasi fiskal bertujuan dalam memenuhi aspirasi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menanggung terselenggaranya pelayanan publik minimal di setiap daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah (Hastuti, 2018).

Pemerintah daerah telah diberi landasan otonomi daerah yang lebih luas sebagai cara pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Otonomi daerah yakni diyakini sebagai bentuk pelimpahan wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat yang telah memegang kekuasaan dalam mengurus wilayahnya di bidang keuangan ataupun non keuangan (Gani & Kristanto, 2013). Perwujudan dari kebijakan pemerintah Indonesia terhadap otonomi daerah adalah strategi yang dianggap sesuai aspek desentralisasi dan demokratis. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, angka kemiskinan ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Kemiskinan menurut Rasu *et al.*, (2019) merupakan keadaan tidak memadai dalam memenuhi standar hidup rata-rata suatu daerah yang berpendapatan rendah. Ketidakmampuan yang dimaksud seperti kebutuhan pokok makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga berdampak pada standar kesehatan dan pendidikan masyarakat. Sayifullah & Gandasari (2016) menjelaskan rendahnya taraf hidup atau tingkat kekurangan materi dibandingkan taraf hidup yang berlaku umum di masyarakat disebut dengan istilah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang ada di masyarakat setiap saat, baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun maju. Luasnya wilayah negara, keragaman kondisi sosial budaya masyarakat serta maraknya berbagai bentuk kemiskinan membuat persoalan kemiskinan di Indonesia cukup kompleks. Hal ini diiringi dengan masalah kemiskinan yang bersifat multidimensional akibat tidak hanya mempengaruhi pendapatan, tetapi juga kerentanan menjadi miskin serta ketidakmampuan terhadap pemenuhan hak dasar (Siregar & Ramadhan, 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Setelah berkoordinasi dengan legislatif, DPRD, APBD dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan warganya mengenai alokasi prioritas. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

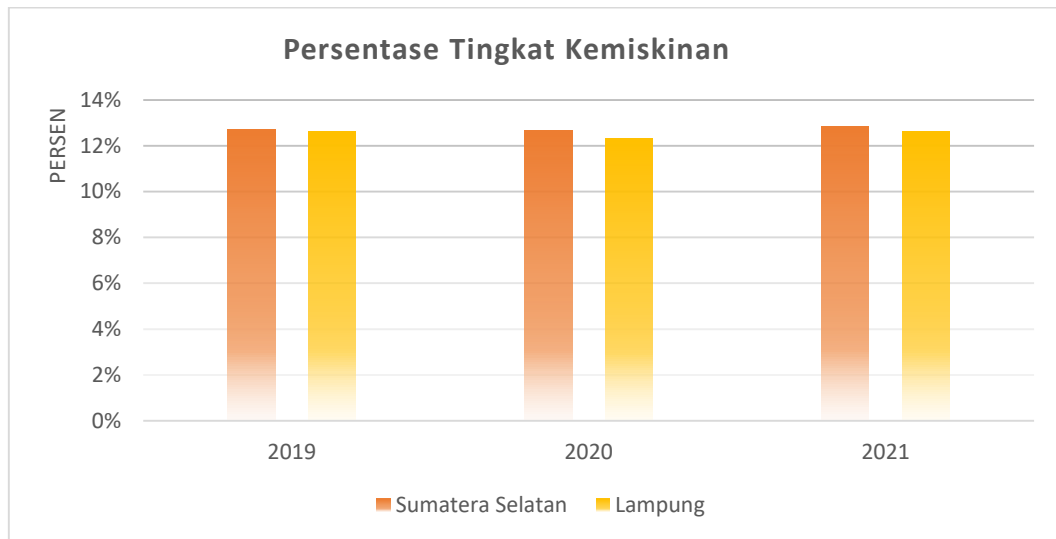
Penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menekan kemiskinan dari tahun ke tahun bisa dilihat dari tingkat kemandirian daerah yang diperoleh pendapatan asli daerah tersebut. Tinggi rendahnya pendapatan daerah mempengaruhi peran PAD dalam struktur keuangan daerah serta kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Hal ini serupa dengan penelitian Amami & Asmara (2022); Fitriyanti & Handayani, (2020); Bado *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berperan penting dalam memengaruhi kemiskinan. Pemerintah daerah dan pusat berusaha dalam menurunkan kemiskinan yang terjadi dengan melakukan berbagai cara penanggulangannya.

Adapun belanja daerah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dapat dilakukan melalui belanja modal selain PAD dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Belanja modal diharapkan bisa mengoptimalkan lapangan kerja dan perekonomian dalam mengurangi kemiskinan yang ada di daerah. Pelaksanaan belanja modal digunakan untuk pembiayaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, jalan serta asset lainnya

(Amanda & Rahmadi, 2021). Adanya peningkatan belanja modal berdampak pada peningkatan pendidikan, infrastruktur, tenaga kerja, pendapatan masyarakat, kesehatan dan kesempatan kerja serta mereduksikan kemiskinan (Rohima *et al.*, 2020). Sehingga disimpulkan belanja modal berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan sejalan dengan penelitian Amanda & Rahmadi, (2021) & Isa *et al.*, (2019).

Selain PAD dan Belanja Modal, faktor tingkat pengangguran juga dapat mempengaruhi kemiskinan. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya tenaga kerja lain yang terjadi terus menerus, sedangkan penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Selain itu, ada industri yang mengalami kebangkrutan dan terpaksa memberhentikan karyawannya. Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang sangat nyata dan sangat dekat dengan lingkungan masyarakat (Sayifullah & Gandasari, 2016). Pernyataan ini serupa dengan penelitian oleh Lumowa *et al.*, (2021); Fahrika *et al.*, (2020) & Sumarsono *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Pulau Sumatera terdapat 10 Provinsi di dalamnya, antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung dan Bangka Belitung. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung dari segi tingkat kemiskinan yang ada di kedua provinsi hampir sama. Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung sama-sama menyentuh tingkat kemiskinan di angka 12% di tahun 2020-2021. Berikut ini dilihat pada gambar 1.1 data Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung:



Sumber: BPS (2022), *diolah*

Gambar 1. 1 Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2021

Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan gambar 1.1 persentase untuk tingkat kemiskinan menunjukkan trend cenderung fluktuatif. Dilihat bahwa pada 2020 tingkat kemiskinan sempat menurun dari tahun sebelumnya sebesar 12,71% menjadi 12,66% yang disebabkan adanya strategi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menekan angka kemiskinan. Namun di tahun 2021 meningkat kembali menjadi 12,84% karena dampak dari pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga masyarakat banyak kehilangan pekerjaan dan membuat angka kemiskinan naik.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan trend cenderung fluktuatif. Dilihat pada tahun 2019 persentase kemiskinannya sebesar 12,62% menjadi turun di tahun 2020 sebesar 12,34%. Namun meningkat kembali di tahun selanjutnya akibat dari pembatasan kegiatan sosial agar bisa meredam pandemi *Covid-19* sehingga bertambahnya penduduk

miskin di Lampung menjadi 12,62%. Namun pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung masih tetap di tuntut dalam memprioritaskan meminimumkan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut.

Dalam berbagai kebijakan dan strategi dengan pembiayaan yang telah diatur oleh pemerintah, pemerintah daerah harus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu cara kebijakan pemerintah yaitu mengalokasikan pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah. Menurut (Izzati & Indrawati, 2021) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, uang yang berasal dari wilayah daerah itu sendiri untuk membiayai aktivitas penyelenggaraan otonomi daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini dapat dilihat pada gambar 1.2 data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung:



Sumber: BPS (2022), *diolah*

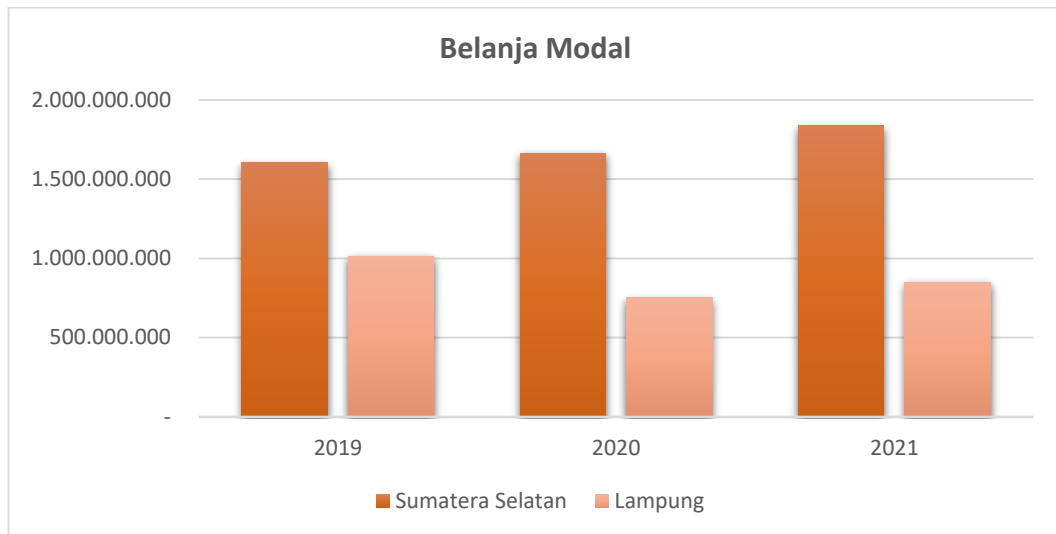
Gambar 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 1.2 setiap tahunnya Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dan penurun PAD yang menunjukkan adanya peningkatan dan

penurunan dalam kinerja pengumpulan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera mengalami penurunan PAD di tahun 2020 menjadi Rp 3,37 triliun akibat dari dampak *Covid-19* adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Namun kembali meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar Rp 3,86 triliun. Hal ini dikarenakan Kota Palembang memiliki kemandirian daerah yang paling baik disebabkan tingginya sumber PAD di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan gambar 1.2 setiap tahunnya di Provinsi Lampung mengalami kenaikan dan penurunan PAD juga seperti pada Provinsi Sumatera Selatan. Dilihat dari 3 tahun terakhir PAD provinsi Lampung bahwa 2020 sempat menurun dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2,84 triliun yang menjadi penyebab dampak dari *Covid-19* yang melanda Indonesia sehingga perekonomian ikut menurun. Tahun 2021 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 3,33 triliun karena adanya dorongan pemerintah dalam mengatasi dampak yang diakibatkan *Covid-19*. Bandar Lampung menjadi sumber PAD tertinggi di Provinsi Lampung yang berasal dari retribusi daerah serta pajak daerah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain.

Belanja daerah yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dapat dilakukan melalui belanja modal selain PAD dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Diharapkan belanja modal akan membantu ekonomi serta menciptakan lapangan kerja sehingga membantu menurunkan kemiskinan pada daerah terutama di daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Berikut ini dilihat pada gambar 1.3 data Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung:



Sumber: BPS (2022), *diolah*

Gambar 1. 3 Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 1.3, pada Provinsi Sumatera Selatan belanja modal selama 2019-2021 mengalami fluktuasi meningkat. Pada tahun 2020 belanja modal meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 1,66 triliun. Begitupun di tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp 1,83 triliun. Hal ini dapat menunjukkan bahwa peningkatan realisasi Belanja Modal memiliki *multiplier effect* dalam jangka panjang terhadap perekonomian terutama di masa pandemi *Covid-19*. Komitmen pemerintah daerah akan mendorong pembangunan infrastruktur melalui peningkatan nilai Belanja Modal serta mendorong minat investor mendukung pemulihan ekonomi Sumatera Selatan.

Pada Provinsi Lampung belanja modal selama 2019-2021 mengalami fluktuasi. Belanja modal Provinsi Lampung di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 752,42 miliar dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya

penurunan akibat pandemi *Covid-19* yang melanda. Namun pemerintah kembali membuat strategi untuk mengurangi dampak yang diakibatkan pandemi terhadap perekonomian sehingga di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 849,69 miliar.

Selanjutnya pengangguran adalah aspek lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan memiliki korelasi dimana tingginya kemiskinan diiringi juga dengan tingginya tingkat pengangguran. Kondisi masyarakat yang tidak bekerja akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan di masyarakat meningkat (Giovanni, 2018). Berikut ini dapat dilihat pada gambar 1.4 persentase Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung:



Sumber: BPS (2022), *diolah*

Gambar 1. 4 Persentase Pengangguran Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 1.4 mengenai Tingkat Pengangguran yang ada di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa mengalami fluktuasi. Pengangguran sempat meningkat di tahun 2020 sebesar 5,51%. Hal ini disebabkan adanya dampak pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat banyak kehilangan pekerjaan. Namun di tahun 2021 pemerintah mencoba mengatasi pandemi sehingga membuat tingkat pengangguran menurun menjadi 4,98% di Sumatera Selatan. Adapun tingkat pengangguran di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi meningkat. Pengangguran meningkat di tahun 2020 sebesar 4,67% dan 2021 sebesar 4,69%. Hal ini diakibatkan masih besarnya pengaruh dari dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negeri serta kurangnya penanganan pemerintah Provinsi Lampung dalam mengatasi masalah pengangguran tersebut.

Meskipun telah menunjukkan bahwa pengangguran secara bertahap mulai berkurang selama sepuluh tahun terakhir pada Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung, kasus ini menunjukkan bahwa lapangan kerja tidak dapat menampung jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga pengangguran akan terus meningkat.

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pengangguran pada Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung meningkat cukup signifikan di setiap tahun, namun dalam kenyataannya tidak menjanjikan kemiskinan pada daerah tersebut mengalami penurunan secara signifikan juga. Maka diperlukan meneliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan

Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Sumatera Selatan dan Lampung.

Penelitian ini dilakukan karena masih sedikitnya penelitian lain yang meneliti pengaruh kemiskinan dengan komparasi dua provinsi. Fokus penelitian ini adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Pengangguran terhadap kemiskinan dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Maka berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan : Komparasi Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan : Komparasi Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menganalisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan: Komparasi Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1. Berfungsi dalam meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah kemiskinan.
2. Diharapkan memberikan bantuan atau kontribusi pengembangan konsep pengentasan kemiskinan untuk pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat menyusun anggaran secara efektif dan efisien dalam merealisasikannya.

b. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan menjadi manfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang tingkat kemiskinan khususnya pada Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.
2. Menambah referensi dilingkungan akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, *11*(2), 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Amanda, Y., & Rahmadi, S. (2021). Analisis Dampak Belanja Modal dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tebo. *Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, *10*(1), 11–18.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, *20*(2), 149–167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- Bado, B., Alam, S., & Cahyani, A. (2019). The Effect Of Government Admission On Poverty In The City Of Makassar: 2000-2017. *Advances in Economics, Business and Management Research*, *75*, 219–222. <https://doi.org/10.2991/icmemm-18.2019.26>
- Fahrika, A. I., Salam, H., & Buhasyim, M. A. (2020). Effect of human development index (HDI), unemployment, and investment realization toward poverty in South Sulawesi- Indonesia. *International Journal of Social Sciences World*, *2*(02), 110–116. <https://www.growingscholar.org/journal/index.php/TIJOSSW>
- Fajri, M. B., Astuti, S. Y., & Hanafi, M. I. (2020). the Effect of Local Original Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Profit Sharing Funds on Regional Expenditures in Aceh Province. *Journal of Economics, Management, and Business Research (JEMBER)*, *1*(2), 109–120. <https://doi.org/10.29103/jmpe.v2i1.1497>
- Fauziah, H. (2016). Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah. *JOM Fakultas Hukum*, *III*(2), 1–14.
- Febriansyah, D. (2022). *PAD Sumsel 2021 Lampau Target, Tahun Ini Naik 5,68 Persen*. Diakses 12 Juni 2023. <https://sumsel.inews.id/berita/pad-sumsel-2021-lampau-target-tahun-ini-naik-568-persen/2>
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, *9*(2), 79–90. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Gani, W., & Kristanto, S. B. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal InFestasi*, *9*(2), 115–122.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro.

- Giovanni, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922>
- Gujarati, D. N. (2012). Dasar-dasar ekonometrika. In *Erlangga*.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 784–799. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Huda, I. U., & Karsudjono, A. J. (2021). Belanja Daerah Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Komunitas Bisnis Dan Manajemen*, 8(2), 50–77. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v8i2.5298>
- Isa, D. P., Arham, M. A., & Dai, S. I. (2019). Effects of Capital Expenditures, Development Index and Unemployment on Poverty in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*, 1(1), 23–30. <https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.1998>
- Izzati, A. N., & Indrawati, L. R. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Magelang. *Paradigma Multidisipliner*, 2(4), 333–340. <http://smkn1magelang.sch.id/jpm/index.php/jpm/article/view/1/1>
- Jhingan, M. . (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (D. Guritno (Ed.)). Rajawali Pers.
- Kadafi, M., & Murtala. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 23–30. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203>
- Kaligis, E., Engka, D. S. ., & Tolosang, K. D. (2017). Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Minahasa Utara melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Intervening Variabel. *Jurna Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 94–105. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/17586>
- Lumowa, R. P., Noukoko, A. T., & Rompas, W. F. I. (2021). Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2019. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 60–68.
- Muslihatinningsih, F., & Abidin, J. (2020). Analisis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium (JEK)*, 4(2), 29–39. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEK>
- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i1.597>
- Rany, A. P. (2021). Pengaruh PAD , DAU , dan Belanja Modal Terhadap

- Kemiskinan (Studi Kasus 38 Kab / Kota Di Prov Jawa Timur Periode 2010-2019). *Fakultas Ekonomi Bisnis*.
- Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019>
- Rejekiingsih, T. W. (2011). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 28–44. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.203>
- Rohima, S., Liliana, L., & Putri, A. K. (2020). Poverty Reduction in Regencies/Municipalities in South Sumatra Province. *Society*, 8(2), 581–595. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215>
- Rosana, D. (2022). *DJPb ingkatkan kabupaten/kota di Sumsel percepat belanja modal*. Diakses 12 Juni 2023. <https://sumsel.antaranews.com/berita/663985/djpb-ingatkan-kabupatenkota-di-sumsel-percepat-belanja-modal>
- Safitri, H., & Saleh, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Non Modal, Penanaman Modal Asing, Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Kemiskinan Kalimantan Selatan. *File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJ A_PRINT.Docx*, 3(1), 229–242.
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(9), 79–83. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278>
- Saputri, S. F., & Anwar, P. H. (2019). Interelasi Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 91–110. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9545>
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 236–255. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Siregar Khamilah, O., & Ramadhan Alfi, P. (2020). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Publik*, 11(2), 1–13.
- Sumarsono, H., Ermita, Y., & Alma'amun, S. (2022). The Impact of Macroeconomic Effect and Fiscal Policy on Poverty in Indonesia in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(2), 230–242.
- Suripto, & Subayil, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap

- Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 127.
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal, dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan kabupaten/kota di jawa timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514–526. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6288>
- Syaiful. (2006). Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi*, 1–12.
- Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik* (Monalisa (Ed.)). Rajawali Pers.
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*, 8(3), 176–185.
- Yintayani, N. N., Suarjana, A. A. G. M., & Murni, N. G. N. S. (2019). Influence of Local Original Revenue and Economic Growth on Poverty Rate in Regency/City of Bali Province. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 15(2), 85–94. <https://doi.org/10.31940/jbk.v15i2.1410>